

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Bertolak dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Hasil ini dibuktikan dengan nilai t-hitung untuk variabel pendapatan asli daerah sebesar 37,171. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel yang sebesar 2,036. Maka t-hitung yang diperoleh jauh lebih besar dari nilai t-tabel. Nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,000 < 0,05$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Sehingga variabel X_1 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa X_1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
2. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Hasil analisis diperoleh nilai t-hitung untuk variabel dana perimbangan sebesar -3.095. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel yang sebesar 2,036. Maka t-hitung yang diperoleh jauh lebih kecil dari nilai t-tabel kemudian terlihat pula bahwa Nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,004 < 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0

diterima. Sehingga variabel X_2 tidak memiliki kontribusi terhadap Y . Nilai t negatif menunjukkan bahwa X_2 mempunyai hubungan yang tidak searah dengan Y . Jadi dapat disimpulkan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

3. Belanja modal secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Hasil nilai t -hitung untuk variabel belanja modal sebesar 0.551. Jika dibandingkan dengan nilai t -tabel yang sebesar 2,036. Maka t -hitung yang diperoleh jauh lebih kecil dari nilai t -tabel kemudian terlihat pula bahwa nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,586 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Sehingga variabel X_3 memiliki kontribusi terhadap Y . Nilai t positif menunjukkan bahwa X_3 mempunyai hubungan yang searah dengan Y . Jadi dapat disimpulkan belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Untuk menunjang peningkatan belanja daerah dalam memperluas pembangunan dan kesejahteraan rakyat maka hendaknya dilakukan peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan melihat kenyataan yang ada PAD harus banyak mengalokasikan belanja pada belanja modal yang berorientasi pada sektor penerimaan sehingga kemandirian suatu daerah akan nampak dengan menurunnya

ketergantungan terhadap pemerintah pusat yaitu transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan, terkait dengan hal tersebut diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mandiri dengan hasil yang dikelola oleh pemerintah daerah, meningkatkan belanja modal dan akan berujung pada peningkatan Pendapatan asli daerah, semakin besar kontribusi untuk belanja modal maka akan semakin berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan dapat dikatakan mandiri.

2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar, melihat pengaruh PAD, Dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan melalui rasio kemandirian masih kecil, maka saran yang dapat diberikan untuk menambahkan variabel lainnya seperti variabel X Belanja pegawai. Dan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat ditambah dengan menggunakan pengukuran Rasio Keserasian variabel Y. Pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tujuan agar dapat membiayai belanja

daerahnya sendiri sehingga mengurangi transfer Dana Perimbangan dari pemerintah pusat sebagai wujud kemandirian daerah dalam membiayai belanjanya. Kemampuan untuk memenuhi belanja daerah membuktikan bahwa pemerintah daerah belum efisien terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi belanja pegawai yang tinggi, untuk meningkatkan PAD, di sarankan pengalokasian belanja modal lebih berorientasi pada sektor penerimaan maka akan menunjang Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Widarjono. 2005. *Ekonometrika*. Ekonosia. Yogyakarta
- Ariani, Kurnia. 2010. *Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tax Effort Kabupaten/Kota Eks Kresidenan Surakarta*. Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- Burhani, Ruslan. 2012. *Pemkab Bone Bolango Target Picu PAD*. [www.Antara News.Com](http://www.AntaraNews.Com) di Akses Kamis 10 mei 2012 Pukul 16:22 WIB
- Dewi, Adha. 2006. *Kajian Penerapan Akuntansi Biaya pada Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Elmi, Bacrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. UI- Press. Jakarta.
- Ghozalia, Imam (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Halim, Abdul & Iqbal. 2012. *Pengelolaan keuangan daerah*. Edisi 3. YKPN. Jakarta
- Hamzah, Ardi. 2008. *Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten Dan 9 Kota Di Propinsi Jawa Tlimur Periode 2001 – 2006)*. Universitas Trunojoyo.
- Julitawati, Ebit. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*

Khairupan, Azam. 2011. *Peranan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah*. Studi khusus pada DPPKAD Kabupaten Banggai. Sulteng. Skripsi UNG

Mamonto, Wahiyudin. 2013. *Penghasilan Pemkab Bone Bolango Bergantung Dana Perimbangan*. www. Antara News.Com di akses Jumat 12 Juli 2013 Pukul 16:55 WIB

Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta

Nugroho, Fajar. 2012. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening*. Studi Khusus pada Provinsi Jawa tengah. *Jurnal Universitas Diponegoro*

Prasetyo, Aris. 2012. *Belanja Pegawai di Gorontalo Memakan Anggaran Besar*. www. Kompas.Com di akses Kamis 23 Februari 2012 Pukul 20:17 WIB

Pratidina, Mega. 2011. *Kinerja Keuangan Pemerintah Serta Tingkat kesehatan dan Tingkat Kemiskinan Di kabupate Bilitar Tahun Anggaran 2008-2010*

Patrick, Patricia A. 2007. *The Determinants of Organizational Innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government*. Ph.D. dissertation, The Pennsylvania State University, United States – Pennsylvania. Retrieved August 8, 2011, from Accounting & Tax Periodicals. (Publication No. AAT 3266180).

Rukmana Vidi Wan. 2013. *Pengaruh Pajak daerah, Retribusi daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah provinsi Kepulauan Riau*. Studi kasus Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau.

- Santoso, Singgih. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistika Parametik*. Penerbit PT Elex Media Komputindo. Jakarta
- Simanuallang, Gideon. 2013. *Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli daerah Terhadap Kinerja Keuangan*. Studi Kasus Kota & Kabupaten Kepulauan Riau. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
- Sugiyono. 2011. *Statistika Non Parametrik Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung
- Syaiful. 2008. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Tanjung, Hafis. 2006. *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Uyanto, Suryadi. 2006. *Pedoman Analisis Data Dengan SPSS*. Graha Biru. Yogyakarta
- Yuliandriansyah. 2009. *Otonomi Daerah dan Investasi*. Artikel Online. (<http://yuliandriansyah.staff.uir.ac.id/2009/02/02/otonomi-daerah-dan-investasi/>, diakses tanggal 21 Januari 2011)
- Yuwono, Sony. Dkk. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Bayumedia Publishing. Surabaya.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*.